

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2015**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**DAUD WIDO IMMANUEL PANGGABEAN**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## ABSTRACT

### **The Effect of Regional Generated Revenue (PAD) and Balancing Fund to Economic Growth in City and District Governments in Lampung Province**

by

**Daud Wido Immanuel Panggabean**

The purpose of this study is to prove empirically about the influence of Regional Generated Revenue (PAD) and balancing fund on the economic growth as measured by the Regional Gross Domestic Product (PDRB). Balancing fund measurement uses three indicators, namely Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), and Specific Allocation Fund (DAK). After performing multiple regression analysis with fixed effect model on panel data set for 14 city and district governments in Lampung Province during 2011-2015, the result showed that the variable of PAD, DBH and DAU have positive effect to the economic growth. Meanwhile, the DAK variable does not affect the economic growth in Lampung Province.

**Keyword : Economic Growth, Regional Generated Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Decentralization, Lampung Province.**

## ABSTRAK

### **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015**

**Oleh**  
**Daud Wido Immanuel Panggabean**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dana perimbangan menggunakan tiga indikator, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Setelah melakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode *fixed effect model* (FEM) terhadap data panel dari 14 kabupaten/kota dalam periode 2011-2015, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel PAD, DBH, dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Desentralisasi, Provinsi Lampung.

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011-2015**

**Oleh**

**DAUD WIDO IMMANUEL PANGGABEAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011-2015**

Nama Mahasiswa

**: Daud Wido Immanuel Panggabean**

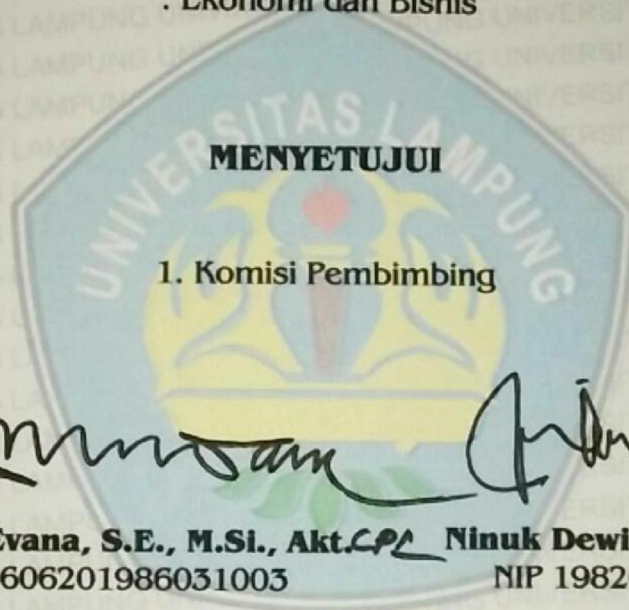
Nomor Pokok Mahasiswa : 1511031143

Jurusan

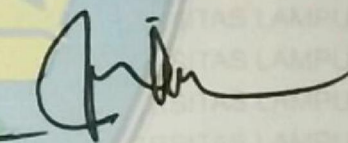
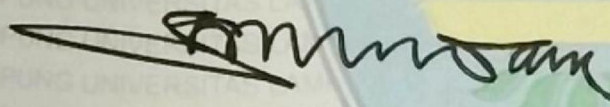
: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

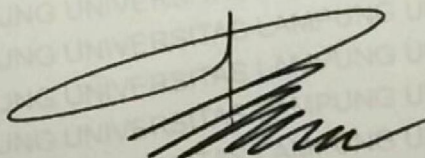


1. Komisi Pembimbing



**Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.** **Ninuk Dewi K., S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 195606201986031003 NIP 198202202008122003

2. Ketua Jurusan Akuntansi



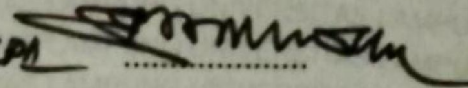
**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP 196206121990102001



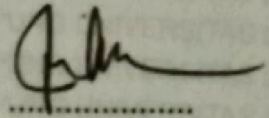
## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

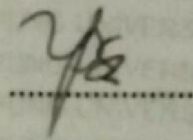
Ketua : **Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.**



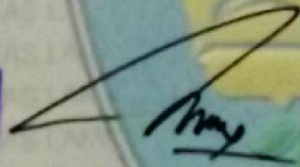
Sekretaris : **Ninuk Dewi K., S.E., M.Si., Akt.**



Penguji Utama : **Yullansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.**



### 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Hl. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 196109041987031011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 September 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2017  
Penulis,



Daud Wido Immanuel Panggabean



## RIWAYAT HIDUP



Daud Wido Immanuel Panggabean, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 5 Oktober 1990 dari pasangan Bapak Ir. T.H. Panggabean dan Ibu R.P. Saragih, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Eria Medan, pada tahun 1995. Dilanjutkan dengan pendidikan dasar tahun 1996 di SD Negeri 060827 Medan dan lulus pada tahun 2002. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Medan yang diselesaikan pada tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Medan hingga lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Penilai/PBB di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis merintis karir sebagai auditor pelaksana di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur, hingga akhirnya pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui beasiswa program *State Accountability Revitalization Project* (STAR) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB).



## SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan anugerah-Nya skripsi berjudul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015**” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus pembimbing akademik selama menjalani perkuliahan di Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., sebagai Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, memberikan motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Ninuk Dewi K., S.E., M.Si., Akt., sebagai Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, memberikan dukungan,

pelajaran, bimbingan, dan arahan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

6. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., sebagai Penguji Utama. Terima kasih atas segala masukan, arahan dan nasihat yang diberikan guna penyempurnaan skripsi.
7. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala bimbingan, pengajaran, pelayanan dan bantuan yang diberikan.
8. Kedua orang tua, Bapak Tumpak Hasiholan Panggabean dan Ibu Rotua Parulian Saragih yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa serta selalu memberikan nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
9. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP *batch* II Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, September 2017

Penulis,

Daud Wido Immanuel Panggabean

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### DAFTAR ISI

#### DAFTAR TABEL

#### DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori <i>Stewardship</i> .....	9
2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.3.1 Pajak Daerah.....	12
2.3.2 Retribusi Daerah.....	14
2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan.....	14
2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	15
2.4 Dana Perimbangan.....	15
2.4.1 Dana Bagi Hasil.....	16
2.4.2 Dana Alokasi Umum.....	20
2.4.3 Dana Alokasi Khusus.....	21
2.5 Penelitian Terdahulu.....	23

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	25
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	25
2.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .	25
2.7.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	27
2.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	27
2.7.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.2 Populasi dan Sampel.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
3.4 Operasional Variabel Penelitian.....	32
3.4.1 Variabel Dependen .....	32
3.4.2 Variabel Independen.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
3.5.1 Pemilihan Model Regresi.....	35
3.5.1.1 Uji Chow.....	35
3.5.1.2 Uji Hausman .....	36
3.5.1.3 Uji Lagrange Multiplier (LM) .....	37
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	38
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	38
3.5.2.2 Uji Autokorelasi.....	39
3.5.2.3 Uji Multikolinearitas.....	39
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	40
3.5.3 Pengujian Hipotesis .....	40
3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi.....	41



3.5.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi.....	41
3.5.3.3 Uji Hipotesis .....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
4.1 Hasil Analisis Data .....	43
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	43
4.2 Pemilihan Model Regresi .....	45
4.2.1 Uji Chow .....	46
4.2.2 Uji Hausman.....	47
4.3 Pengujian Asumsi Klasik .....	48
4.3.1 Uji Normalitas .....	48
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	49
4.3.3 Uji Autokorelasi .....	50
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.....	51
4.4 Estimasi Model Regresi Data Panel.....	52
4.5 Pengujian Hipotesis .....	54
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi.....	54
4.5.2 Uji Kelayakan Model Regresi .....	54
4.5.3 Uji Hipotesis.....	55
4.6 Pembahasan .....	57
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung .....	58
4.6.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung .....	60
4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung .....	61
4.6.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung .....	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	64
5.1 Simpulan .....	64
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3 Saran .....	65
5.4 Implikasi Hasil Penelitian .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Penerima Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)..... 4
1.2	Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tahun 2011–2015..... 5
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu..... 23
4.1	Hasil Statistik Deskriptif..... 43
4.2	Hasil Pengujian Chow Test..... 47
4.3	Hasil Pengujian Hausman Test..... 48
4.4	Matriks <i>Statistic Correlation</i> ..... 50
4.5	Rentang Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson..... 51
4.6	<i>Residual Absolute Glejser Test</i> ..... 52
4.7	Hasil Estimasi Regresi..... 53
4.8	Hasil Uji Hipotesis (Uji statistik t)..... 56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
4.1 <i>Histogram Normality Test</i> .....	49
4.2 Grafik PAD kabupaten/kota Provinsi Lampung 2011-2015.....	59



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan sentralistik yang terjadi pada masa Orde Baru menciptakan dominansi pemerintah pusat terhadap daerah yang mematikan kemandirian daerah sehingga mengakibatkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Salah satu penyebab terhambatnya pembangunan ekonomi di daerah disebabkan karena kurangnya keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya sendiri. Otonomi daerah di Indonesia merupakan sebuah langkah penting sebagai respon terhadap krisis yang dialami pada tahun 1997-1998. Desentralisasi dianggap dapat menjadi langkah yang efektif dalam terwujudnya pemerataan pembangunan di daerah serta tersalurkannya pelayanan publik yang lebih baik dikarenakan pemerintah daerah memiliki akses informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, pemberian wewenang dan tanggung jawab harus diimbangi dengan adanya pembagian sumber penerimaan yang memadai yang mampu mendukung terlaksananya pemerintahan daerah. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian di dalam mendanai setiap pengeluaran pemerintah daerah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam studi

yang dilakukan Dewi (2013) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai modal yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Al Khoiri (2015) dalam Salawali (2016) menyatakan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban fungsi antar tingkat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan kemampuan ekonomi yang berbeda antar daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini diperlukan suatu pengaturan secara adil mengenai hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk membantu pemerintah daerah mendanai segala kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi.

DBH (Dana Bagi Hasil) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Pengalokasian DBH sebagai salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur berupa sarana dan prasarana akan menunjang aktivitas ekonomi dalam kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Dalam studi yang dilakukan Hendriwiyanto (2014) menjelaskan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bermakna semakin tinggi Dana

Bagi Hasil yang diterima daerah akan mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan Dana Bagi Hasil yang fleksibel dari segi pengelolaannya menyebabkan daerah lebih leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonominya.

DAU (Dana Alokasi Umum) suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah. DAU lebih diprioritaskan untuk daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah. Dalam penelitiannya, Nopiani *et al* (2016) menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Hal ini tidak jauh berbeda dari peran PAD yaitu sebagai modal dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum menjadi sumber penerimaan dengan porsi terbesar di Provinsi Lampung dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Provinsi Lampung menerima DAU sebesar Rp11.168.215.000.000, DBH sebesar Rp682.322.509.361, dan DAK sebesar Rp1.801.136.710.000. Berikut disajikan data penerima Dana Alokasi Umum menurut provinsi di Sumatera Tahun 2011-2015.

**Tabel 1.1**  
**Penerima Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi di Sumatera**  
**Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)**

No	Provinsi	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1	Aceh	6.862.600	9.130.843	9.814.462	9.526.061	13.233.914	9.713.576
2	Sumatera Utara	12.220.099	14.599.996	15.819.699	16.962.967	20.747.956	16.070.143
3	Sumatera Barat	5.985.588	7.846.955	5.153.801	8.607.488	12.060.166	7.930.800
4	Riau	3.946.056	3.756.266	3.102.815	6.265.380	6.403.011	4.694.706
5	Jambi	4.427.994	4.924.077	5.692.931	4.991.184	6.755.002	5.358.238
6	Sumatera Selatan	6.580.752	7.392.906	5.451.613	6.139.643	10.268.422	7.166.667
7	Bengkulu	2.652.679	4.451.572	4.068.475	4.533.108	5.846.917	4.310.550
<b>8</b>	<b>Lampung</b>	<b>5.347.179</b>	<b>8.073.599</b>	<b>7.891.339</b>	<b>8.350.529</b>	<b>11.168.215</b>	<b>8.166.172</b>
9	Bangka Belitung	2.398.023	3.290.512	2.626.664	2.519.886	3.934.975	2.954.012
10	Kepulauan Riau	1.550.341	1.866.195	2.182.150	2.282.080	2.778.881	2.131.929

Sumber: *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*

Tabel 1.1 di atas menunjukkan daerah penerima Dana Alokasi Umum disepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2011 sampai dengan 2015. Provinsi Lampung menjadi daerah ketiga penerima DAU terbesar di Pulau Sumatera selama tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan angka rata-rata Rp8.166.172.000.000. Provinsi Sumatera Utara menerima DAU tertinggi di Sumatera dengan angka rata-rata Rp16.070.143.000.000. Diurutan kedua adalah Provinsi Aceh dengan angka rata-rata Rp9.713.576.000.000.

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam studinya, Usman (2008) dalam Setyowati dan Suparwati (2012) menjelaskan



bahwa penggunaan dan pemanfaatan DAK di daerah menjadi faktor penting dalam keseluruhan program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Sesuai dengan penggunaannya, yaitu fokus alokasi kepada belanja fisik sarana dan prasarana infrastruktur, aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi penopang bagi masyarakat di daerah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan *output* barang dan jasa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dalam mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah diperlukan indikator yang *representative*. Dalam hal ini kondisi pertumbuhan ekonomi di Lampung dapat diproksikan oleh PDRB Lampung atas dasar harga konstan selama kurun waktu lima tahun terakhir masing-masing Rp106,56 juta (2011), Rp113,42 juta (2012), Rp119,96 juta (2013), Rp126,06 juta (2014), dan Rp132,52 juta (2015). Dari angka-angka PDRB tersebut terlihat bahwa PDRB Lampung tiap tahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan proses membaiknya ekonomi. Seperti yang ditampilkan pada tabel 1.2 di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Lampung**  
**Tahun 2011-2015**

<b>Keterangan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	112.94	124.43	135.76	153.41	168.15
PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	106.56	113.42	119.96	126.06	132.52
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.56	6.44	5.77	5.08	5.13

Sumber: *BPS Lampung*

Hasil dari beberapa penelitian terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi cukup beragam. PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti

yang diungkapkan oleh Gunantara dan Dwirandra (2014), namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Zakhiya (2011) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Penelitian mengenai pengaruh PAD, DAK, DAU, DBH, dan pertumbuhan ekonomi yang pernah dilakukan oleh Hendriwiyanto dan Kholis (2014), dan hasil pengujian secara langsung menunjukkan PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nopiani *et al.* (2016) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, pada penelitian Nopiani *et al.* (2016) hanya menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel dana bagi hasil dan dana alokasi khusus serta tidak menggunakan variabel belanja modal. Penulis merasa perlu menambahkan variabel dana bagi hasil dan dana alokasi khusus karena selain dana alokasi umum, dana perimbangan yang diterima daerah dari pemerintah pusat yaitu dana bagi hasil dan dana alokasi khusus diperkirakan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan kedua, periode penelitian ini adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penulis mengambil rentang waktu lima tahun dengan asumsi periode lima tahun dirasa cukup menggambarkan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Lampung. Perbedaan ketiga, cakupan wilayah dari penelitian ini adalah kabupaten/kota yang berada pada Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung bertumbuh positif dari tahun 2011 hingga tahun 2015, selain itu Provinsi Lampung juga merupakan daerah penerima DAU terbesar

ketiga se Sumatera. Hal ini menjadi alasan penulis dalam memilih Provinsi Lampung sebagai objek penelitian.

Atas dasar uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan judul “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2015”.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Lampung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan di bidang ekonomi, khususnya ekonomi makro, yaitu terkait dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal di masa yang akan datang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori *Stewardship***

Donaldson dan Davis (1991) dalam Pebriani *et al.* (2017) menjelaskan teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok prinsipal dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

*Stewardship Theory* beranggapan bahwa kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan dengan membagi (*shared*) wewenang, hak dan kewajiban di antara peranan pengawas/pemeriksa dan manajemen, sehingga dalam *Stewardship Theory* menyatakan bahwa para eksekutif cenderung akan semakin termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri (Hunger dan Wheelen, 2004).

Menurut Murwaningsari (2010) *Stewardship theory* dibangun atas dasar asumsi filosofi mengenai sifat manusia yakni pada hakekatnya manusia dapat dipercaya,

mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Dengan kata lain teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini dapat menjelaskan eksistensi pemerintah kabupaten/kota sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya (*steward*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

## **2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pembangunan ekonomi (*economic development*) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan di bidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses kenaikan output (produksi) dalam jangka panjang (Sunusi, 2014).

Menurut Todaro (2006) dalam Santosa (2013) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.

- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital.
- c. Kemajuan teknologi

Salah satu indikator dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah tanpa memperhatikan kepemilikan asal faktor produksi atas barang dan jasa tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penghitungan nilai PDRB dapat dilakukan dengan 2 jenis harga, yaitu menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan pendekatan atas dasar harga konstan (ADHK). Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

### **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. (Darise, 2009)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

### **2.3.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulator*). Sebagai pendapatan pajak daerah, setiap pajak harus memenuhi *smith's canons* yang terdiri dari unsur

keadilan (*equity*), unsur kepastian (*certainty*), unsur kelayakan (*convenience*), efisien (*efficiency*), dan unsur ketepatan (*adequacy*) (Halim dan Iqbal, 2012: 202).

Besarnya tarif pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi dalam 2 jenis meliputi:

1. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.3.2 Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil (tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar), dan merupakan pungutan yang sifatnya *budgetair* tidak menonjol. Retribusi daerah untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda jenis dan ragamnya tergantung potensi yang ada di tiap-tiap daerah. Secara umum retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perijinan Tertentu.

### **2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan**

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 104), hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

#### **2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

#### **2.4 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi (Sari *et al.*, 2014).

Nasution (2015) dalam Rahmawati (2017) menjelaskan dana transfer/bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran

untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Aprizay dkk, 2014).

#### **2.4.1 Dana Bagi Hasil**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri atas:

##### **1. Penerimaan Pajak**

###### **a. PPh Orang Pribadi**

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- 2) 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan

###### **b. Cukai Hasil Tembakau**

Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau dibagikan kepada daerah sebesar 2% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 0,6% untuk provinsi yang bersangkutan;
- 2) 0,8% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan; dan
- 3) 0,6% untuk pemerataan kabupaten/kota lainnya.



## 2. Penerimaan Bukan Pajak

### a. Sektor Kehutanan

Dana Bagi Hasil sektor kehutanan terdiri atas:

- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
- Dana Reboisasi (DR).

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran hak pengusaha hutan dibagi dengan perincian:

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- 64% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.

Bagian daerah dari penerimaan negara provisi sumber daya hutan dibagi dengan perincian:

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- 32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.
- 32% untuk daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang

bersangkutan. Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian daerah dari penerimaan yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Sektor Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil sektor pertambangan umum terdiri atas:

- Penerimaan iuran tetap (*land-rent*), adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan umum, eksplorasi, dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan.
- Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*), adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (*royalty*) satu atau lebih bahan galian.

Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- 32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.
- 32% untuk daerah kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

c. Sektor Perikanan

Dana Bagi Hasil sektor perikanan berasal dari pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan. Bagian daerah dari Dana Bagi Hasil sektor perikanan sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

d. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dibagi sebagai berikut.

Daerah imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah.

Bagian daerah dibagi dengan rincian:

- 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.
- 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

e. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan negara dari pertambangan gas bumi dibagi sebagai berikut.

Daerah imbangan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah.

Bagian daerah dibagi dengan rincian:

- 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.

- 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

DBH Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

f. Sektor Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil sektor pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah atau iuran tetap dan iuran produksi. Bagian penerimaan daerah untuk sektor pertambangan panas bumi sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil;
- 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

#### **2.4.2 Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari

perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah (Djaenuri, 2012:103). Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

#### **2.4.3 Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut:

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari Dana Reboisasi).
3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan ditetapkan oleh menteri /instansi terkait.

Adapun kriteria pengalokasian DAK meliputi:

1. Kriteria Umum

Sesuai dengan pasal 40 UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa alokasi DAK mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.

2. Kriteria Khusus

Ditetapkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang meliputi: untuk Provinsi (terdiri dari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata), untuk Kabupaten/Kota (terdiri dari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata).

### 3. Kriteria Teknis

Kriteria teknis dirumuskan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait.

Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi saran prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan di danai oleh DAK. Kriteria teknis berdasarkan lingkup kegiatan yaitu, Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan&perikanan, pertanian, lingkungan hidup, prasarana pemerintahan, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan, sarana kawasan, transportasi pedesaan, keselamatan transportasi, dan sarana prasarana.

### 2.5 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini terangkum dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Tahun</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Buleleng	2016	Ni Made Nopiani, Wayan Cipta, dan Fridayana Yudiaatmaja	PAD, DAU, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi	PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai	2013	Stepvani Uhise	DAU, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal	DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Intervening				
Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi	2014	Guntur Hendriwiyanto dan Nur Kholis	PAD, DAU, DBH, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal	PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	2014	Febrian Dwi Prakarsa dan Iswan Noor	PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	PAD dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	2011	Afrizal Tahar dan Maulida Zakhya	PAD, DAU, Kemandirian Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi	PAD, DAU, dan Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Pengaruh PAD, PMA Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali	2013	Sakita Laksmi Dewi dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja	PAD, PMA, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi	PAD dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Pengaruh PAD Dan DAU Pada	2014	Putu Candra Gunantara dan	PAD, DAU, Belanja	PAD dan DAU berpengaruh

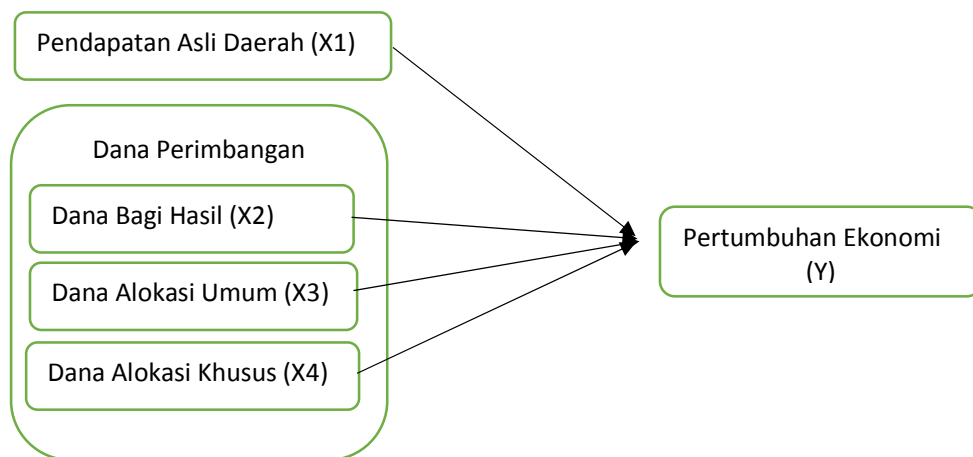


Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali		A.A.N.B. Dwirandra	Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi	positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
--	--	--------------------	--------------------------------	---

## 2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## 2.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

### 2.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah diberikan mandat (*steward*) dalam mengelola sumber daya daerah yang bertujuan untuk membiayai segala kebutuhan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup penting dalam membiayai belanja pemerintah daerah guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Mardiasmo (2002) dalam Prakarsa (2014) menyebutkan bahwa upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang merupakan tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dengan meningkatnya kemandirian suatu daerah melalui peningkatan PAD dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sebaliknya jika PAD rendah maka pertumbuhan ekonomi juga rendah.

Variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi telah digunakan dalam penelitian Nopiani *et al.* (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Prakarsa (2014) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

**H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**

### **2.7.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pemerintah daerah sebagai sebuah lembaga (*steward*) yang diberikan kepercayaan untuk mengelola penerimaan daerah melalui dana perimbangan sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Menurut Wandira (2013) DBH merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Melalui dana bagi hasil, pemerintah daerah mempunyai tambahan dana dalam membiayai terselenggaranya pemerintahan daerah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Semakin tinggi dana bagi hasil yang diterima daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jika dana bagi hasil yang diterima sedikit pertumbuhan ekonomi dapat menjadi terhambat.

Dalam penelitiannya, Hendriwiyanto dan Kholis (2014) menyimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

**H2 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**

### **2.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Tujuan utama dari DAU adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Penggunaan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus kepuasan masyarakat dimana pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, besarnya DAU yang diterima suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi yakni Nopiani *et al.* (2016), Uhise (2013), dan Hendriwiyanto dan Kholis (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

**H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**

#### **2.7.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besarnya DAK yang diterima dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan dalam roda perekonomian. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga diharapkan dapat menarik para pelaku ekonomi untuk berinvestasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil Penelitian Santosa (2013) menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian yang berbeda diperoleh dari penelitian Hendriwiyanto dan Kholis (2014) yang menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

**H4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, (2014:131) data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan berupa data keuangan kabupaten dan kota se Provinsi Lampung periode 2011-2015, yang meliputi dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Terdapat 14 kabupaten/kota yang menjadi sampel pada penelitian ini. Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dari tahun 2011-2015.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari

tahun 2011-2015. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengambil sampel adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mengeluarkan laporan keuangan dari tahun 2011-2015.
- b. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah memasukkan data laporan realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2011-2015.
- c. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang bukan merupakan hasil pemekaran wilayah dari tahun 2011-2015.

### **3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Lampung diperoleh dengan cara mengunduh di website Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung ([www.lampung.bps.go.id](http://www.lampung.bps.go.id)). Sedangkan data anggaran dan realisasi belanja daerah diunduh di website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Alat yang akan digunakan untuk pengujian statistik adalah *software Eviews 9*. Data dimasukkan ke dalam perangkat lunak Microsoft Excel 2007 dalam format *.xlsx*, lalu diimpor ke dalam *software Eviews 9* untuk diuji.

### 3.4 Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (*growth*).

Untuk mengukur variabel pertumbuhan ekonomi diproksikan melalui nilai pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2011-2015. Penulis menggunakan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh perubahan harga atau inflasi telah dihilangkan sehingga lebih menggambarkan perekonomian secara riil. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010):

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{(\text{PDRB tahun berjalan} - \text{PDRB tahun sebelumnya})}{\text{PDRB tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah tanpa memperhatikan kepemilikan asal faktor produksi atas barang dan jasa tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB suatu wilayah dapat dilakukan melalui pendekatan pengeluaran dimana PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh pelaku-pelaku ekonomi untuk kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor. Komponen pengeluaran atau penggunaan PDRB ini terdiri dari:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b. Pengeluaran konsumsi pemerintah



- c. pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. perubahan inventori
- e. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor)

### **3.4.2 Variabel Independen**

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nilai dari variabel Pendapatan Asli Daerah untuk tiap Kabupaten/Kota di Lampung dilihat dari pos Pendapatan Asli Daerah dalam laporan realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota periode 2011-2015.

#### **b. Dana Bagi Hasil**

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Wandira (2013) dalam Handayani *et al* (2015) menyatakan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam

mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Variabel Dana Bagi Hasil diukur melalui dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Nilai dari Dana Bagi Hasil untuk tiap Kabupaten/Kota di Lampung dilihat dari pos pendapatan transfer dalam laporan realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota periode 2011-2015.

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penyaluran dana alokasi umum didasarkan pada kebutuhan fiskal daerah yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Nilai dari Dana Alokasi Umum untuk tiap Kabupaten/Kota di Lampung dilihat dari pos pendapatan transfer dalam laporan realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota periode 2011-2015.

d. Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan,

dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Nilai dari Dana Alokasi Khusus untuk tiap Kabupaten/Kota di Lampung dilihat dari pos pendapatan transfer dalam laporan realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota periode 2011-2015.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

#### **3.5.1 Pemilihan Model Regresi**

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dalam menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Beberapa hal yang akan dihadapi saat menggunakan data panel adalah koefisien *Slope* dan intersepsi yang berbeda pada setiap antar ruang dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, asumsi intersepsi, *slope*, dan *error*-nya perlu dipahami karena ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, beberapa kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleks estimasi parameternya sehingga diperlukan beberapa metode untuk melakukan estimasi parameternya, seperti pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effects* (Widarjono,2013). Dari ketiga teknik estimasi tersebut akan dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Pemilihan tersebut didasarkan atas uji-uji sebagai berikut:

##### **3.5.1.1 Uji Chow**

Pengujian yang pertama adalah untuk memilih teknik analisis yang akan digunakan paling baik di antara model *fixed effect* dan *Ordinary Least Square*.

Untuk melakukan pengujian tersebut, peneliti akan menggunakan uji signifikansi *fixed effect* yang disebut sebagai Uji Chow. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara  $F_{\text{stat}}$  dengan  $F_{\text{tabel}}$ . Nilai  $F_{\text{stat}}$  atau sering juga disebut sebagai  $F_{\text{hitung}}$  dapat diperoleh dari olahan data *Eviews 9*, sedangkan nilai  $F_{\text{tabel}}$  dicari dengan cara menggunakan tabel ataupun dengan menggunakan alat bantu *microsoft excel*. Hipotesis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$  : model *common effect*

$H_a$  : model *fixed effect*

Apabila  $F_{\text{stat}} > F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dari pada model *common effect*. Sebaliknya apabila  $F_{\text{stat}} < F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa model *common effect* lebih baik dari pada model *fixed effect*.

### 3.5.1.2 Uji Hausman

Pengujian berikutnya yang dilakukan adalah untuk memilih teknik analisis yang paling baik di antara model *random effect* dan model *fixed effect* untuk digunakan dalam pengujian regresi. Untuk melakukan pengujian tersebut, peneliti akan melakukan uji Hausman. Pelaksanaan uji Hausman dapat dilakukan dengan fasilitas *software Eviews 9*. Dari hasil uji Hausman ini nanti akan dilihat nilai *chi-square* statistik/hitung dan probabilitasnya. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Model *Random Effect*

$H_a$  : Model *Fixed Effect*

Pada aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini (*eviews 9*), apabila nilai *chi-square* statistik/hitung  $>$  *chi-square* tabel dan *p-value* signifikan ( $P\text{-value} < \alpha$ ) maka  $H_0$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *fixed effect*, sebaliknya apabila nilai *chi-square* statistik/hitung  $<$  *chisquare* tabel dan  $P\text{-value} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *random effect*.

### 3.5.1.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Apabila dari kedua pengujian sebelumnya didapatkan hasil pada salah satu pengujian atau bahkan kedua pengujian ada yang menerima  $H_0$ , selanjutnya dilakukan pengujian yang dinamakan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang disebut juga *Breusch - Pagan Random Effect*. Namun, jika hal tersebut tidak terjadi, maka pengujian ini tidak perlu untuk dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk memilih teknik analisis yang akan digunakan paling baik di antara model *common effect* dan model *random effect*. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Model *Common Effect*

$H_a$  : Model *Random Effect*

Hasil uji *Lagrange Multiplier* akan dilihat nilai statistik *chi-squares* hasil olahan data *eviews*. Apabila nilai dari uji *Lagrange Multiplier* nilainya lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-squares*, maka  $H_0$  ditolak. Dengan kata lain akan digunakan model *random effect* karena dianggap lebih baik. Apabila nilai dari hasil Uji *Lagrange Multiplier* berada dibawah nilai kritis statistik *chi-square* maka

$H_0$  diterima. Jika  $H_0$  diterima maka dapat diambil kesimpulan lebih baik menggunakan model *random effect*.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik diperlukan agar regresi linier berganda mencapai kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik yang digunakan diantaranya uji autokorelasi, multikolinieritas, heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal. (Gujarati, 2012)

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menilai bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Gujarati: 2012). Uji normalitas pada aplikasi *EViews 9* dapat dilakukan dengan melihat pola pada histogram yaitu nilai probabilitas pada histogram tersebut, ataupun melakukan uji Jarque-Bera.

Hasil dari uji normalitas ini dapat disimpulkan dengan melihat tampilan histogramnya, data yang terdistribusi normal akan menampilkan pola kurva normal yang berbentuk seperti lonceng terlengkap. Namun demikian akan sulit melihat hanya dari gambar histogram saja, oleh karena itu untuk memperkuat kesimpulan, dapat dilihat dari nilai uji Jarque-Bera. Nilai uji Jarque Bera (JB) yang diperoleh dari histogram normality test pada *Eviews 9* dibandingkan dengan nilai *chi-square* tabel. Jika hasil JB hitung lebih besar dari nilai *chi-square* tabel artinya data tidak terdistribusi normal, dan sebaliknya jika JB hitung lebih kecil dari nilai *chi-square* tabel artinya data terdistribusi normal.

### 3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada periode  $t$  dengan residual pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) pada model regresi linier (Gujarati, 2012). Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu uji Durbin Watson (DW test) dan Uji Breusch-Godfrey (Winarno, 2011). Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji Durbin Watson (DW test). Hasil uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai  $d$  yang akan berada di kisaran 0 hingga 4. Di mana apabila  $d$  terletak di antara 0 dan  $dL$ , maka disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif. Bila  $d$  terletak di antara  $dL$  dan  $dU$  maka tidak dapat diputuskan. Bila  $d$  terletak di antara  $dU$  dan  $4-dU$  maka tidak terjadi autokorelasi. Bila  $d$  terletak di antara  $4-dU$  dan  $4-dL$  maka tidak dapat diputuskan. Bila  $d$  terletak di antara  $4-dL$  dan 4 maka terjadi autokorelasi negatif.

### 3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menilai apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Gujarati, 2012). Apabila terjadi korelasi antar variabel bebas, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Untuk menilai korelasi antar variabel tersebut pada *EViews 9* digunakan *correlation matrix* (Winarno, 2011). *Correlation matrix* tersebut akan menampilkan nilai korelasi di antara variabel-variabel bebas. Jika korelasi antar variabel-variabel bebas tersebut di atas 0,80 maka dapat disimpulkan terdapat gejala multikolinearitas.

### 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gujarati: 2012). Penulis menggunakan uji glejser yakni dengan meregresikan nilai mutlaknya. Dengan ketentuan, jika nilai probabilitasnya tidak signifikan atau di atas nilai  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada heteroskedastisitas. Namun, jika nilai probabilitasnya signifikan atau di bawah nilai  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak, yang berarti ada masalah heteroskedastisitas. Pada aplikasi *EViews 9* untuk melihat hasil uji glejser tersebut penulis menggunakan pengujian nilai dari *residual absolute*. Heteroskedastisitas sering terjadi pada data yang bersifat *cross section* dibandingkan data yang bersifat *time series*.

### 3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan menggunakan program *Eviews 9*. Analisis Regresi linier berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian.

Model dalam penelitian ini adalah:

$$\text{LnPe} = \alpha + \text{Ln}\beta_1\text{PAD} + \text{Ln}\beta_2\text{DBH} + \text{Ln}\beta_3\text{DAU} + \text{Ln}\beta_4\text{DAK} + e$$

Dimana :

Ln Pe	= pertumbuhan ekonomi
$\alpha$	= konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= koefisien variabel independen
Ln PAD	= pendapatan asli daerah
Ln DBH	= dana bagi hasil
Ln DAU	= dana alokasi umum
Ln DAK	= dana alokasi khusus
e	= error term

Untuk menguji ketepatan model regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat



diukur dengan menggunakan uji koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*), uji statistik F, dan uji statistik t.

### **3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*)**

Koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarati, 2012). Nilai kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang mendekati satu berarti menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan bila *adjusted R<sup>2</sup>* mendekati nol maka semakin lemah variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas (Ghozali, 2013).

### **3.5.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji statistik F)**

Model regresi penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian telah layak untuk dilanjutkan pengujian selanjutnya. Menurut Ghozali (2013) dengan tingkat signifikan 0,05, kriteria pengujiannya:

- 1) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$  maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$  maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

### **3.5.3.3 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)**

Uji hipotesis ( Uji statistik t ), uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh

variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka hipotesis alternatif yang menyatakan suatu variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dapat diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika  $t_{hitung}$  lebih rendah dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Sementara itu, tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan penggunaan Dana Alokasi Khusus yang disesuaikan dengan prioritas nasional bisa jadi bukanlah menjadi prioritas daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan sehingga Dana Alokasi Khusus tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Terdapat keterbatasan yang dihadapi penulis terkait data penelitian, yaitu:

1. Pada penelitian ini penulis hanya mengambil sampel 14 kabupaten/kota dari 15 kabupaten/kota yang ada di Lampung. Hal ini disebabkan karena terdapat

satu kabupaten yang memisahkan diri dari kabupaten induknya pada tahun 2012 sehingga tidak memiliki data yang disyaratkan. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum menggambarkan kondisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara menyeluruh.

2. Sampel pada penelitian ini hanya dibatasi pada kabupaten dan kota tertentu, yaitu 14 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
3. Variabel yang diteliti hanya menggunakan empat variabel yang diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

### **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran–saran yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu menambah variabel-variabel lain yang dimungkinkan relevan dengan pertumbuhan ekonomi seperti variabel non keuangan (kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan sebagainya).
2. Penggunaan data dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang dan terbaru sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

#### 5.4 Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung diantaranya:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengoptimalan potensi – potensi sumber penerimaan khususnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan belanja daerah yang memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar menjaga kualitas pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan memperhatikan pengalokasian agar tepat sasaran dan mencapai tujuan sehingga dapat memacu kesejahteraan masyarakat. Dengan pengalokasian penggunaan DAU yang sesuai sasaran maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat meningkat.
3. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar terus melakukan pengkajian yang intensif terhadap sektor penerimaan yang menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) mengingat dana bagi hasil dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan dibagikan berdasarkan angka persentase tertentu. Selain itu tetap menjaga kualitas pengelolaan DBH karena terbukti memberikan pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprizay, Yudi Satrya., Darwanis., Muhammad Arfan. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.3, No.1 : 140-149
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2016. *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015*. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Lampung. <http://www.lampung.bps.go.id/>. Diakses tanggal 28 April 2017
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi kedua. Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- Djaenuri, Aries 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Dewi, Sakita Laksmi dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PAD, PMA Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 11.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses tanggal 28 April 2017
- Gujarati, Damodar N., Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba 47.
- Gunantara, Putu Candra dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.3
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal., 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Sri Putri, Syukriy Abdullah, & Heru Fahlevi. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi* 4, No. 2.

- Hendriwiyanto, Guntur dan Kholis, Nur. 2014. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol.3, No. 1.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2004. *Strategic Management and Business Policy*, 9th Edition, Pearson Prentice Hall.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Maryanti, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Murwaningsari, Ety. 2010. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities Dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 11, no. 1 (January 27, 2010) pp. 30-41.
- Nachrowi, D dan Usman, Hardius. 2006. *Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Nasution, Abdillah Arif. (2015). The Effect Of Fiscal Potential And Needs On Regional Bottom Aid Model (BDB) In North Sumatera Province. *European Journal Of Accounting Auditing And Finance Research*. Vol.3 No.2 PP 70-86
- Nopiani, Ni Made, Wayan Cipta, & Fridayana Yudiaatmaja. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 4.
- Pebriani, Ni Kadek, Edy Sujana, dan I Gusti Ayu Purnamawati. 2017. Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)* 7, No. 1
- Prakarsa, Febrian Dwi dan Iswan Noor. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, No. 2
- Rahmawati, Masayu dan Catur Martian Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. 1

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta. DPR RI.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Jakarta. DPR RI.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. DPR RI.
- Salawali, Wiwin Anggriani, Paulus Kindangen, & Agnes C. H. Lopian. 2016. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 18 No. 2.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol.5 No.2.
- Sari, Rosi Puspita & I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 3, No. 10:452-459.
- Setyowati, Lilis dan Suparwati, Yohana Kus. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Prestasi*, Vol. 9, No. 1, pp 113-133.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Sunusi, Dewi. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 14, No. 2.
- Tahar, Afrizal dan Maulida Zakhiya. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.12, No.1.
- Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.4



Wakhyudi. 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Ciawi: Pusdiklatwas BPKP.

Wandira dan Gugus, Arbie. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 1.

Widarjono Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN

Winarno, Wing Wahyu. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 3*. Yogyakarta: STIM YKPN.